

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Kabupaten Muna

Visi Kabupaten Muna

Pemimpin yang sensitif terhadap kaum marjinal. Pemerintah Daerah Muna, bersama-sama dengan DPRD, mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang mengatur bahwa seluruh kebijakan publik harus dibuat secara partisipatif dan transparan, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintahan daerah menghargai dan menindaklanjuti hasil-hasil perencanaan dan penganggaran desa, yang sifatnya pro-kemiskinan dan perempuan. Calon kepala daerah menggunakan visi-visi desa di Muna sebagai salah satu acuan dasar dalam penyusunan visinya pada saat kampanye pilkada (pemilihan kepala daerah).

Para pemimpin lembaga legislatif, eksekutif (di setiap level pemerintahan, dari desa hingga kabupaten), dan OMS (organisasi masyarakat sipil), bekerja secara sungguh-sungguh dan amanah demi kemakmuran rakyat. Para pemimpin tersebut akan sering turun ke pelosok-pelosok desa untuk berdialog, merasakan secara langsung kondisi kehidupan warga desa, dan menyerap aspirasi warga. Mereka pun akan bekerja keras mewujudkan aspirasi kaum marjinal. Secara bersama-sama, pejabat-pejabat pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD akan memperjuangkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Bupati memimpin pemerintahan dengan berwibawa, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. DPRD melaksanakan fungsi kontrol, budget, dan legislasi untuk melahirkan kebijakan daerah yang pro-rakyat, khususnya kaum marjinal. Kepala desa mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan desa. Warga sangat sadar akan hak-haknya dan aktif memperjuangkan pemenuhannya melalui pelbagai saluran dan ruang yang tersedia.

Otonomi Desa. Sumberdaya di desa dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat mendapat ruang yang lebih luas sehingga mampu dan aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa mereka. Masyarakat desa pun terlibat secara aktif di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan di lingkup desa dan kabupaten. Pemerintah desa memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dan telah sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, unsur supra-desa seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tidak lagi melakukan intervensi terhadap apa yang secara hukum diakui sebagai kewenangan desa.

Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang partisipatif. Warga Kabupaten Muna telah berhasil memperoleh ruang terbuka untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Seluruh kebijakan publik seperti perda (peraturan daerah) dan perdes (peraturan desa) disusun secara partisipatif dalam setiap tahapan prosesnya. Pemerintah daerah telah menjalankan perda tentang perencanaan, penganggaran dan pengawasan anggaran yang partisipatif, perda tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, dan perda tentang ADD (Alokasi Dana Desa). Pemerintah desa juga telah menyusun peraturan desa tentang APBDDesa.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan partisipatif. Semua desa (237 Desa) di Kabupaten Muna telah memiliki RPJM Desa yang disusun secara partisipatif. Masyarakat desa melaksanakan program pembangunan dengan mengacu kepada dokumen RPJM Desa. Masyarakat desa secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan perencanaan. Dokumen RPJM Kabupaten Muna disusun berdasarkan dokumen-dokumen RPJM

desa-desa di Muna. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif. OMS aktif melakukan proses-proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen RPJM dalam pembangunan desa.

Perempuan berdaya. Perempuan memperoleh peluang yang sama dalam segala aspek untuk merealisasikan kehidupannya. Perempuan mempunyai kemampuan untuk mandiri. Pengambil kebijakan publik di tingkat daerah (bupati, kepala dinas, dan seterusnya) memberikan peluang dan kepercayaan kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi pemerintahan. Kaum perempuan bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas kaum perempuan. Kaum perempuan berupaya mengakses sumber daya guna menciptakan lapangan kerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kaum perempuan berani untuk terlibat aktif dalam semua proses pengelolaan pembangunan.

OMS kuat dan bisa dipercaya. OMS mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan berperan dalam memfasilitasi pengawalan berbagai kebijakan termasuk kebijakan anggaran daerah yang lebih berpihak pada kelompok marginal. Kepercayaan terhadap OMS terbentuk karena organisasi-organisasi tersebut memiliki kemampuan yang handal pada isu-isu yang ditekuni, termasuk kemampuan dalam memfasilitasi proses-proses perencanaan dan penganggaran, dari tingkat desa hingga kabupaten. OMS telah membangun konsolidasi dalam sebuah jaringan kerja yang saling mendukung, dan aktif melakukan diskusi reguler serta saling-bagi (*sharing*) pembelajaran dalam suasana kebersamaan dan solidaritas.

Institusi ekonomi rayat yang kuat. Tumbuh bermacam kelompok usaha kecil dan menengah yang kuat dan meluas di berbagai desa yang menghidupkan ekonomi lokal. Warga desa, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya, mampu mengembangkan koperasi dan badan usaha milik masyarakat (BUMM) di tingkat desa, yang mempermudah pemasaran hasil-hasil produksi warga desa. Warga desa mampu mengelola koperasi dan badan-badan usaha bersama demi kesejahteraan anggota (warga), serta menjadikan seluruh badan usaha tersebut sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dinas Koperasi pun memiliki kebijakan pengembangan UKM di Muna. Bank mengembangkan akses kredit yang murah dan mudah diakses. Pengurus koperasi dan BUMM tidak memonopoli pengelolaan institusi ekonomi rakyat tersebut, dan para anggota (koperasi dan badan usaha) turut aktif mengawasi pengelolaan institusi ekonomi rakyat yang mereka miliki.

Informasi mudah diakses masyarakat. Tersedia radio komunitas pada setiap kecamatan. Masyarakat desa mempromosikan produk lokal lewat radio komunitas yang telah tergabung dalam jaringan kerja yang saling mendukung. Masyarakat secara aktif memanfaatkan pula radio komunitas untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Agenda Bersama Kabupaten

1. Adanya pemimpin yang sensitif terhadap kaum marginal (Lahirnya pemimpin yang amanah pilihan rakyat baik itu dilembaga eksekutif, DPRD, dilevel Desa).
2. Perempuan berdaya (Perempuan memperoleh kesempatan/peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan dan mempunyai kemampuan untuk mandiri)
3. PERDA dan PERDES yang dibuat partisipatif (Adanya PERDA/PERTDES yang dibangun secara partisipatif, misalnya; Perda tentang perencanaan, penganggaran dan pengawasan anggaran yang partisipatif, Perda tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, perdes tentang APBDes).
4. Otonomi Desa (Masyarakat telah mengelola semua sumberdaya di desa untuk kepentingan masyarakat; Masyarakat bebas menentukan pilihan dalam mengambil/berpartisipasi dalam proses pembangunan; ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan; berdaulat secara politik mandiri secara ekonomi bermartabat secara budaya).
5. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan partisipatif

6. Informasi mudah diakses masyarakat
7. OMS kuat dan bisa dipercaya
8. Institusi ekonomi rakyat yang kuat

Summary Concept Paper

Kabupaten :Muna
Nama Lembaga :Yayasan Melayu Lestari (YAMUL)
Judul :Mendorong Penyelenggaraan Otonomi Desa, Menuju Kesejahteraan Warga
Periode Program :3 tahun

Yayasan Melayu Lestari ingin mewujudkan penyelenggaraan otonomi desa yang mampu mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Secara khusus, rencana aksi ini ingin mendorong kebutuhan nyata masyarakat Desa menjadi acuan utama penyusunan program-program pembangunan di Desa. Menguatnya implementasi kewenangan yang dimiliki oleh Desa terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan otonomi Desa. Meningkatkan dan menguatnya kemampuan Desa dalam membiayai pelaksanaan program-program pembangunannya. Rencana aksi akan menggunakan strategi penguatan kapasitas, mendorong kalahiran regulasi di tingkat desa dan kabupaten, mendorong terlaksananya proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah (Desa-Kabupaten) yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rencana aksi akan berkerja dengan stakeholder di tingkat desa dan kabupaten yang dapat mendorong terwujudnya perubahan yang diinginkan oleh YAMUL. Program ini akan dilaksanakan di Desa-Desa pada 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Muna.

Kabupaten : Muna
Nama Lembaga : Yayasan Kritik
Judul Concep Paper : “Penguatan warga dan Komite Sekolah dalam Mendorong Perbaikan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Muna”.
Durasi Program : 30 bulan (Agustus 2009 s/d Maret 2011)

Yayasan Kritik mengajukan sebuah kertas gagasan yang berjudul “Penguatan warga dan Komite Sekolah dalam Mendorong Perbaikan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Muna”. Program ini ingin melihat perubahan-perubahan di tingkat warga/orangtua murid, komite sekolah dan dinas pendidikan. Warga atau orang tua murid aktif melakukan protes atas layanan sekolah yang buruk, aktif dalam rapat-rapat yang dilakukan komite sekolah, sudah terlibat dalam perencanaan program sekolah, sudah memahami peran utama komite sekolah, sudah aktif melakukan kontrol terhadap komite sekolah, memilih anggota komite sekolah secara demokratis. Di tingkat komite sekolah, mereka melaksanakan fungsinya secara efektif sebagai mitra sekolah, sudah menerapkan manajemen organisasi yang partisipatif, transparan dan akuntabel, memiliki aturan internal, sudah berfungsi sebagai organisasi yang kritis, demokratis, inklusif dan akuntabel, sudah terlibat aktif dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi APBS dan dana lain yang dikelola sekolah, sudah memiliki jaringan/forum, jaringan komite sekolah sudah berfungsi secara baik dan terlibat aktif dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan bidang pendidikan. Dan, anggota komite sekolah sudah memahami tugas dan fungsi pokoknya sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan sekolah. Bagi Dinas pendidikan, program ingin mewujudkan Dinas pendidikan sudah memiliki dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara efektif yang dilembagakan melalui Peraturan Daerah. Dan ada mekanisme pengaduan atau komplain yang

efektif untuk perbaikan layanan pendidikan dasar. Rencana aksi ini akan bermitra dengan Dewan pendidikan, PGRI/FPG, LSM, DPRD, media local, dinas pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuannya, pProgram ini akan menerapkan strategy-strategi seperti riset aksi, pemberdayaan orang tua murid, peningkatan kapasitas komite sekolah, fasilitasi pembentukan dan penguatan jaringan/forum/asosiasi komite sekolah, pengembangan media dan sharing informasi. Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan adalah masyarakat pada umumnya dan secara spesifik adalah orang tua murid terutama kaum miskin yang memiliki tanggungan anak sekolah. penerima manfaat lainnya adalah dewan pendidikan dan komite sekolah, guru dan kepala sekolah di 6 kecamatan di kabupaten Muna selama 30 bulan.